



Buletin

Edisi, 292
Februari 2019

Isen Mulang

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi
Publik Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi
dan Publikasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi
Pemerintahan dan Umum pada Biro
Protokol dan Penyaringan Informasi
dan Publikasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan
Dokumentasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Informasi
Ekonomi, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Staf Pelaksana :

Muliyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih,
Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito
Zuares

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya
Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Daftar Isi :

MENPORA : Jalan Sehat Kebangsaan Kokohkan
NKRI___3

Apel Besar Sambut Tahun Baru 2019___4

Gub Kalteng : Hindari Permasalahan Agar Lelang
Tidak Gagal Dilaksanakan___5

Gub Kalteng : Pelayanan Publik Harus Disertai Inovasi
dan Solusi ___6

Gub Kalteng : Penggunaan TKA Harus Sesuai
Aturan.___7

Gub Kalteng : Pesta Demokrasi Harus Dengan
Semangat dan Kegembiraan___8

Gub Kalteng : STOP Kecelakaan, Keselamatan Untuk
Kemanusiaan___9

Gub Kalteng Tegaskan FORSESDASI Agar Tidak
Berpolitik___10

Waketum DPN-IKAPTK Lantik dan Kukuhkan DPP-
IKAPTK Kalteng 2018-2023 ___10

Gubernur Sugianto Sabran Dukung Zona Integritas Di
Kalteng___11

Ekspor Kalteng Tahun 2018 Capai Rp 26,6
Triliun___12

Gub Kalteng : Percepatan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah Sebagai Penggerak Utama
Pembangunan___12

Januari 2019, Inflasi Kalteng Terendah Se-
Kalimantan___13

Kalteng Siapkan Infrastruktur Untuk Dukung Investasi
Masuk Kalteng___14

Pemerintah Terus Berupaya Sediakan Rumah Layak
Huni Bagi MBR___15

Pemprov Kalteng Dukung Peningkatan SDM
UPR___16

Pemprov Kalteng Siap Laksanakan UNBK 2019___17

Kapolda Kalteng Ingatkan Generasi Muda Jangan
Melupakan Sejarah___18

Ketua TP PKK Kalteng Yulistra Ivo : TP PKK Bekerja
Dengan Semangat Relawan___18

Tim Penggerak PKK Kalteng Galakkan Kampanye
AMIR___19

MENPORA : Jalan Sehat Kebangsaan Kokohkan NKRI

Palangka Raya – Biro PKP. Ribuan warga masyarakat Kota Sampit dan sekitarnya termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat larut dalam suasana suka cita dan kegembiraan Jalan Sehat Kebangsaan bersama Menteri Pemuda dan Olah Raga Iman Nachrawi dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran beserta unsur Forkopimda Kalimantan Tengah, yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Surat Kabar Kalteng Pos dalam rangka memperingati dan memeriahkan Ulang Tahun Ke-66 Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, Minggu pagi (13/01).

Jalan Sehat Kebangsaan ini menjadi ajang silaturahmi lintas generasi muda dan generasi tua bersama seluruh komponen masyarakat Kotawaringin Timur. Jalan Sehat Kebangsaan tersebut diawali dengan pengucapan Ikrar Kebangsaan oleh seluruh peserta jalan sehat. Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nachrawi mengatakan jalan sehat suatu hal yang menggembirakan dan ajang silaturahmi sesama warga masyarakat. "Jalan sehat suatu hal yang menggembirakan karena berbagai perbedaan bersatu padu untuk mencapai suasana yang sehat dan bugur. Kebersamaan mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini penting diselenggarakan di seluruh Indonesia", kata Menpora.

Imam Nachrawi mengharapkan Jalan Sehat bisa memotivasi dan inspirasi bagi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bugur. "Saya berharap kegiatan Jalan Sehat ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi warga masyarakat dan pemerintah kabupaten atau kota lainnya untuk mendorong lahirnya masyarakat yang sehat dan bugur. Masyarakat juga betul-betul berada dalam situasi yang kondusif menjelang Pilpres sehingga dapat bersatu dan bekerja untuk kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan", tegas Menpora.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menambahkan, Jalan Sehat Kebangsaan tersebut sebagai moment untuk bersyukur atas keberhasilan pembangunan yang telah dicapai masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. "Keharmonisan ini sangat penting untuk membangun Kalteng dan kita hilangkan perbedaan yang ada untuk menatap Kalteng yang lebih baik lagi di masa depan", jelas Sugianto Sabran.

Selain menghadiri Jalan Sehat Kebangsaan dalam rangka HUT Ke-

66 Kabupaten Kotawaringin Timur, gubernur Kalimantan Tengah juga mengadakan silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan di Sampit, Sabtu malam (12/01).

Gubernur Sugianto Sabran dalam silaturahmi dengan Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat tersebut membeberkan beberapa program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam memasuki 3 tahun masa kerja pemerintahannya. Program dan kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain di bidang ekonomi dengan meningkatkan kualitas perekonomian Kalteng, pelestarian nilai-nilai budaya, penanggulangan narkoba, penataan birokrasi dan menjaga keutuhan NKRI dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. "Melalui forum ini saya mengajak seluruh elemen di Kalteng khususnya di Kotawaringin Timur agar bersama-sama menghilangkan sekat-sekat SARA agar Kalteng bisa maju dan bermartabat serta menolak gerakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI", kata Sugianto Sabran.

Gubernur Sugianto Sabran juga mengajak seluruh warga masyarakat agar tetap menjaga toleransi dan komunikasi yang baik lintas elemen, agama dan lintas budaya, memerangi hoax, ujaran kebencian dan isu-isu SARA yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat. "Mari kita semua berperan aktif mendukung Pemilihan Umum Serentak 2019 sehingga dapat berjalan lancar, damai dan kondusif dengan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat", beber gubernur.***



Apel Besar Sambut Tahun Baru 2019



Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah memasuki Tahun Baru 2019 menggelar Apel Besar dan Halal Bi Halal di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu pagi (02/01).

Apel Besar dan Halal Bi Halal ini merupakan kegiatan rutin tahunan pemerintah provinsi Kalteng yang diikuti ribuan PNS dan Tenaga Kontrak dalam rangka menyambut dan memasuki tahun baru yang bertujuan mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara ASN/Tekon dan Pimpinan SOPD, InstANSI, Badan, Dinas dan Unit Kerja lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

Wakil Gubernur Kalteng Habib H. Said Ismail selaku Inspektur Upacara pada Apel Besar Sambut Tahun Baru 2019 tersebut mengatakan tahun 2018 dilalui dengan berbagai keberhasilan dan tantangan. “Tahun 2018 yang baru saja kita lalui dengan berbagai peristiwa baik suka maupun duka, kegagalan dan keberhasilan kiranya menjadi sebuah kenangan dan pengalaman yang berharga sehingga dapat kita jadikan bahan untuk mengevaluasi program dan

kegiatan pembangunan yang telah dijalankan dan dilaksanakan tahun 2018”, jelas Wagub Kalteng.

PNS sebagai Aparatur Negara diharapkan lebih mencurahkan segenap pikiran bahkan jiwa dan raga sehingga mampu menjadi Abdi Negara yang berintegritas dan profesional serta meningkatkan soliditas dan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkarakter pada tahun 2019. “Upaya menjalankan dan meningkatkan percepatan pembangunan di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dilakukan dengan kerja ikhlas dan tuntas sehingga tahun ini pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD harus ditingkatkan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya”, kata Habib H.Said Ismail.

Untuk itu diharapkan setiap program/kegiatan pembangunan Kalimantan tengah yang merupakan bagian dari NKRI tetap berdasarkan pada Visi Misi Gubernur dengan mengacu pada RPJM Nasional. Pelaksanaan program/kegiatan Kabupaten dan Kota tetap mengacu kepada pelaksanaan program/kegiatan provinsi dan nasional yang akan mengacu kepada pemerintah pusat sehingga capaian Visi Provinsi dan Kabupaten/Kota akan merupakan capaian nasional.

Di bidang politik tahun 2018 telah dilaksanakan Pilkada serentak di 10 Kabupaten dan Kota yang terselenggara dengan sukses, aman dan lancar. “Hal ini mencerinkan masyarakat Kalteng mulai tumbuh menuju kedewasaan dalam berpolitik yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan tranparansi”, beber Wagub.

Dikemukakan, tanggal 17 April 2019 bangsa Indonesia melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. “Oleh karena itu Kepada Seluruh ASN di provinsi Kalteng agar menjaga netralitas dengan tetap berkonsentrasi terhadap pelaksanaan tugas sebagai ASN sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”, pungkas Wagub Habib H.Said Ismail seraya mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2018 bagi merayakannya dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2019 semoga tahun 2019 membawa berkah bagi seluruh masyarakat di provinsi Kalimantan Tengah.***



Gub Kalteng : Hindari Permasalahan Agar Lelang Tidak Gagal Dilaksanakan

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat menghindari permasalahan sehingga lelang tidak batal atau gagal dilaksanakan. “Seharusnya tidak terjadi lelang batal atau gagal dilaksanakan karena proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban dilakukan sendiri oleh masing-masing Perangkat Daerah”, tegas gubener Kalteng dalam sambutannya dibacakan Wagub Kalteng Habib H.Said Ismail ketika membuka Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng per 31 Desember 2018 di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Kamis (10/01/2019).

Melalui Rapat TEPRA tersebut diharapkan diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran 2018 dan mengantisipasinya sehingga permasalahan tersebut tidak terulang lagi tahun 2019. “Seluruh SOPD/Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran agar segera melaksanakan tender menyusul Kickoff penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Kalteng secara serentak tanggal 17 Januari 2019”, beber gubernur.

Dikemukakan, memasuki tahun anggaran 2019 menjadi tugas bersama untuk mengawasi, memantau dan mengendalikan pelaporan capaian realisasi anggaran secara manual dan elektronik. Pelaporan secara elektronik wajib disampaikan tepat dan akurat sesuai data website resmi pemerintah secara nasional yakni monev.lkpp.go.id dan website lokal pemerintah daerah yang mengakomodir pelaporan tersebut. “Seluruh pengelola TEPRA tetap proaktif memonitoring dan mengevaluasi pencapaian realisasi anggaran, PPTK dan para Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah mempercepat realisasi serta memaksimalkan penyerapan APBD sesuai dengan arus kas sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran dan

pekerjaan fisik dapat selesai tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan”, terang Sugianto Sabran.

Untuk mencapai realisasi anggaran triwulan I sebesar 20 %, triwulan II 50 %, triwulan III 85 % dan triwulan IV 100 % dituntut kesigapan dan kedisiplinan PPTK dan Pengelola Anggaran sehingga pelaksanaan pembangunan dapat tercapai di Kalimantan Tengah.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Ridwa Manurung menjelaskan hasil monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran APBD 14 pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018 tercatat realisasi keuangan 90,39% dan realisasi fisik sebesar 92,82%. “Realisasi tersebut masih di bawah target yang ditetapkan sampai akhir tahun yakni 98% keuangan dan 100% fisik”, jelas Ridwan Manurung.

Dijelaskan juga Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 15,211 triliun dari target Rp 16,251 triliun (93,60%) dan Penerimaan Pendapatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp 1,238 triliun dari target Rp 1,110 triliun (111,47%).

Tahun Anggaran 2019 Total Pagu Anggaran 46 SOPD sebesar Rp 4,11 triliun dengan Pagu BL Rp 2,79 triliun dan Pagu BTL sebesar Rp 1,32 triliun. Tercatat 17 Perangkat Daerah Pemegang BL terbesar di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sebesar Rp 2,44 triliun atau 87,55% dari total Belanja Langsung. “Diharapkan 17 SOPD tersebut lebih fokus terhadap penyerapan anggaran karena sangat berpengaruh terhadap besaran prosentase penyerapan anggaran dengan membuat aksi penyelesaian kegiatan sampai akhir tahun sebagai upaya persiapan pelaksanaan percepatan realisasi anggaran 2019”, kata Ridwan Manurung.***



Gub Kalteng : Pelayanan Publik Harus Disertai Inovasi dan Solusi

PALANGKARA RAYA – BIRO PKP. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyusun Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Tahun 2017-2019. Peta Jalan GNRM tersebut diharapkan menjadi acuan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental pada lingkup kerja, tugas dan kegiatan.

Peta Jalan GNRM itu telah diperkuat dan dipertegas dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Instruksi Presiden RI Nomor : 12 Tahun 2016 tentang GNRM. Kedua Peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah melaksanakan dan mengamalkan Revolusi Mental dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong yang diejawantahkan dalam bentuk program dan kegiatan di beberapa Kementerian dan Lembaga yang mendapat tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut.

Sehubungan dengan maksud tersebut pemerintah provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Workshop Revolusi Mental bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Sekretaris Daerah se-Kalimantan Tengah sebagai wujud komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Gerakan Nasional Revolusi Mental di Palangka Raya, Kamis (21/02).

Kepala BPSDM Kalimantan Tengah Sri Widanarni menjelaskan Workshop Revolusi Mental bagi Pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng itu bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur serta meningkatkan semangat pengabdian aparatur yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu juga dimaksudkan

untuk meningkatkan peran dan fungsi aparatur sebagai pelopor revolusi mental serta meningkatkan sinergitas pemahaman nilai-nilai revolusi mental bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang semakin berkualitas untuk mewujudkan Kalteng BERKAH di Era Revolusi Industri 4.0.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri meminta seluruh aparatur pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng agar memiliki kesadaran untuk selalu bersinergi dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik yang disertai inovasi dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. "Terlebih saat ini kita sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang harus memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Tengah secara efisien dan efektif", jelas Sugianto Sabran..

Menurut Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ada 5 gerakan perubahan dalam Revolusi Mental tersebut yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu baik di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. "Dengan keberhasilan Kalteng meraih Peringkat I Kategori Provinsi Indonesia Bersatu pada Acara Pekan Kerja Revolusi Mental di Manado, 26 Oktober 2018 diharapkan segenap Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalteng semakin terpadu dan berkomitmen menjadi pelopor, perekat dan pemersatu bangsa", tegas gubernur Kalteng tersebut.

Seusai membuka Workshop Revolusi Mental Bagi Pejabat Eselon II se-Kalteng tersebut, Sekda Fahrizal Fitri meresmikan Sistem Informasi Kompetensi ASN yang diluncurkan BPSDM Kalimantan Tengah. Sistem Informasi Kompetensi ASN adalah



Aplikasi Khusus Berbasis Web yang dibuat BPSDM sebagai sistem penunjang penyelenggaraan Diklat BPSDM dalam rangka mengimplementasikan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Dalam Manajemen ASN berbasis Web itu minimal dalam satu tahun setiap ASN bisa mengikuti pengembangan potensi 20 jam pelajaran. Aplikasi ini hadir sebagai solusi untuk memberikan pembelajaran dan Diklat-Diklat berbasis e-learning sehingga mempermudah ASN khususnya yang berada jauh di Kabupaten untuk mengakses pembelajaran tanpa tatap muka.

Selain itu, Sistem Kompetensi ASN ini juga mengimpor Data Kompetensi ASN yang dikumpulkan berdasarkan database dari Badan Kepegawaian Daerah yang mencakup Diklat dan Sertifikasi yang telah dimiliki oleh ASN serta dapat digunakan untuk menentukan pejabat berdasarkan kompetensi yang up to date. ***



Gub Kalteng : Penggunaan TKA Harus Sesuai Aturan.

Palangka Raya – Biro PKP. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi Kalimantan Tengah sampai Agustus 2018 berdasarkan data BPS provinsi Kalimantan Tengah tercatat 54.397 orang atau 4,01%. “Kondisi ini merupakan tantangan bagi aparat yang menangani bidang ketenagakerjaan untuk melakukan inovasi atau terobosan baru dengan menciptakan program atau kegiatan yang berpihak pada upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan”, tegas gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri di hadapan peserta Rapat Koordinasi Teknis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian se-Kalimantan Tengah di Hotel Luwansa Palanghka Raya, Senin pagi (11/02).

Namun di sisi lain, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2016 hingga 2018 berdasarkan penilaian IPK yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan RI cenderung meningkat, terbukti tahun 2016 tercatat 59,40 dan tahun 2017 meningkat menjadi 63,48 sedangkan tahun 2018 mencapai 66,68.

Hal tersebut tercapai atas kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng dalam melakukan komunikasi, sinerjitas dan informasi lintas sektor termasuk dengan Kabupaten dan Kota yang membidangi ketenagakerjaan. “Untuk itu Saya mengharapkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menyiapkan SDM yang kompeten dan mengkondisikan hubungan industrial yang harmonis serta mengembangkan sumber daya lokal sampai di tingkat desa sehingga menjadi potensi ekonomi kreatif dan produktif guna mendorong perluasan kesempatan kerja”, kata gubernur.

Selain itu Sugianto Sabran meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Kabupaten dan Kota agar terus memperhatikan perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja asing



dan memastikan penggunaan tenaga kerja asing tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Di Bidang Ketrasmigrasian ditegaskan dengan berakhirnya kebijakan moratorium program pembangunan transmigrasi baru di Kalimantan Tengah, harus disertai dengan pembenahan sarana dan prasarana. “Kita harus berkomitmen membenahi sarana dan prasarana termasuk infrastruktur di kawasan permukiman transmigrasi serta mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian daerah”, tegas Sugianto Sabran.

Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi maka Pembangunan Transmigrasi Baru (PTB), pembangunan Food Estate dan perluasan cetak sawah baru dapat dilakukan oleh tenaga kerja petani yang berkolaborasi dengan tenaga kerja penduduk setempat.

Sejak dilaksanakannya program transmigrasi di Kalimantan Tengah, telah memberikan kontribusi nyata bagi daerah antara lain membuka keterisolasian daerah pinggiran, mendorong percepatan pembangunan daerah serta memberikan andil dalam pemekaran kecamatan dan kabupaten termasuk mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Kalimantan Tengah dalam bingkai NKRI.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Rivianus Syahrial Tarigas mengatakan Rakorteknis Bidang Ketrasmigrasian ini bertujuan menyamakan persepsi, sinerjitas dan sinkronisasi pelaksanaan program bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian tahun 2019.

Selain itu menyatukan program prioritas untuk usulan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2020.***



Gub Kalteng : Pesta Demokrasi Harus Dengan Semangat dan Kegembiraan

PALANGKA RAYA - BIRO PKP. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Pemilu Legislatif digelar serentak 17 April 2019. Sehubungan dengan Pilpres dan Pileg yang semakin mendekat tersebut, gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Tengah dan Dinas Instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Pilpres dan Pileg 2019 di wilayah Kalimantan Tengah, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (13/02).

Rapat Koordinasi yang dipimpin gubernur Sugianto Sabran itu membahas dan mematangkan persiapan di lingkungan instansi terkait penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi Kalimantan Tengah antara lain mendengarkan laporan kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Polda Kalteng termasuk laporan dari pimpinan daerah di tingkat Kabupaten dan Kota se-Kalteng yang terkait dengan persiapan Pilpres dan Pileg 2019 di wilayahnya masing-masing.

“Sangat penting bagi kita bersama melakukan persiapan untuk menyambut pesta demokrasi ini, dan tentu memerlukan dukungan dengan penuh semangat dan gembira dari masyarakat Kalteng. Untuk mematangkan kesiapan Pemilu tersebut dibutuhkan keseimbangan energi, perencanaan, dan penganggaran yang tepat dan bijak demi kesuksesan pesta demokrasi Pemilu 2019”, ungkap Sugianto Sabran di hadapan peserta Rakor tersebut.

Menyikapi maraknya isu-isu seperti hoax dan ujaran kebencian menurut Sugianto Sabran harus mengambil langkah tegas secara hukum. “Penyebarkan hoax dan ujaran kebencian, terlebih di era masa kini yang marak bermunculan di media sosial dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku agar tidak memicu keributan di antara

para pendukung yang dapat meresahkan masyarakat” tegas gubernur Kalteng.

Sugianto Sabran juga menyoroti Alat Peraga Kampanye (APK) yang merusak pemandangan umum dan kelestarian lingkungan hidup. “Sampai pohon pun dipaku Alat Peraga Kampanye, padahal pohon itu bagian dari lingkungan hidup. Begitu juga di tempat-tempat umum strategis seperti Bandara, Saya berharap dapat diperhatikan dan ditertibkan oleh Banwaslu. APK bisa dipasang sesuai aturan yang berlaku, namun tetap memperhatikan keindahan dan kelestarian lingkungan sekitar”, ungkap Gubernur Kalteng tersebut.

Sementara itu Anggota KPU Kalteng Wawan Wiraatmaja menegaskan pihaknya terus berperan aktif dan berupaya maksimal mensosialisasi serta meyakinkan masyarakat tentang banyaknya isu atau HOAX yang beredar dan harus ditangkal. “KPU bekerja secara profesional, transparan dan terbuka. Contohnya pada isu KPU memasukan orang gila di jalanan. Itu tidak benar, KPU tidak pernah mendata orang gila di jalanan dan tidak pernah menggunakan istilah orang gila dalam data”, tegas Anggota KPU Kalteng tersebut.

Wawan Wiraatmaja di hadapan peserta Rapat Koordinasi tersebut juga menjelaskan KPU Kalimantan Tengah hingga saat ini telah bekerja di seluruh jajarannya dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2019.

Menurut Wawan, pihaknya saat ini terus merampungkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terkait dengan warga yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena adanya dinamika kependudukan seperti pendataan baru ataupun perpindahan penduduk. “Kami sudah meminta kepada seluruh jajaran untuk mulai menyusun guna mengantisipasi permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Langkah menyusun Daftar Pemilih Khusus ini berbeda dengan pemilu sebelumnya”, jelas Wawan.

Demikian juga yang berkaitan dengan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan. “Misalkan para pekerja perusahaan dan mahasiswa untuk tahap pertama kami punya target H-60 (17/2) dapat menetapkan sekitar 70-90% potensi pemilih pindahan dan tahap kedua dengan memperhatikan proses pada tahap pertama” terang Wawan.

Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan pada Desember 2018 tercatat 8.078 TPS dan 1.753.224 orang Pemilih Tetap. Jumlah TPS ini berpotensi bertambah karena ada pemilih-pemilih pindahan seperti para pekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan termasuk pada kompleks hunian mahasiswa seperti asrama.

KPU Kalteng juga terus berupaya melakukan koordinasi dengan pusat terkait dengan data pemilih di RUTAN dan LAPAS, mengingat Kalimantan Tengah terdapat 10 RUTAN dan LAPAS. Data KPU menyebutkan ada sekitar 3.500 warga LAPAS dan dari jumlah tersebut tercatat 1.100 orang sudah masuk DPT. Potensi DPTD sekitar 600 orang dan sekitar 1.300 orang belum tercatat. “Permasalahan ini terkait juga dengan tanggung jawab Disdukcapil tingkat Kabupaten dan Kota yang sebagian besar masih mengurus pemilih warga Kabupaten/Kota terkait, dan belum mencapai pendataan atau mengurus warga Kabupaten/Kota lain yang berada di LAPAS Kabupaten dan Kota tersebut,” ungkap Wawan Wiraatmaja.

Untuk pengadaan dan penyimpanan Kotak Suara dijelaskan tidak ada masalah. Seluruh Kabupaten dan Kota se-Kalteng hingga saat ini telah melaporkan tidak ada masalah mengenai gudang, logistik maupun tempat perakitan kotak suara. “Kami hanya tinggal menunggu laporan seberapa banyak, ada atau tidaknya kerusakan yang terjadi pada kotak suara yang sedang dirakit tersebut agar segera diminta pengantiannya”, ujar Wawan Wiraatmaja.

Pada Rakor tersebut Irwasda

Polda Kalteng Kombes Pol. Benone Jesaja Louhenapessy juga menyatakan kesiapan pihaknya mengamankan dan penyukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 di Kalimantan Tengah. “Untuk kelancaran pesta demokrasi tersebut diminta kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa

seperti black campaign, negative campaign, hoax dan ujaran kebencian yang dapat menjadi potensi konflik sosial”, tegas Irwasda Polda Kalteng.

Diingatkan juga dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan fasilitas Pemda untuk Parpol dan Caleg sehingga dapat

memicu potensi konflik, termasuk pemilih yang ditumpangi dengan agenda yang bertentangan dengan Pancasila seperti ideologi radikal yang dapat mengancam keutuhan NKRI, harus dihindari. Demikian juga untuk meredam potensi konflik di media sosial memerlukan peran pemerintah dan masyarakat.***

Gub Kalteng : STOP Kecelakaan, Keselamatan Untuk Kemanusiaan.

Palangka Raya – Biro PKP. Ribuan warga Kota Palangka Raya turut memeriahkan kampanye tertib berlalu lintas bagi generasi milenial “Millenial Road Safety Festival” yang digelar Polda Kalteng bekerjasama dengan Pemprov Kalteng di kawasan Car Free Day Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu pagi Pukul 06.30 WIB (10/02).

Gelaran yang digagas Direktorat Lalu Lintas Polda Kalteng bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengusung tema “Mewujudkan Milenial Cinta Lalu Lintas Menuju Indonesia Gemilang” itu bertujuan menciptakan ketertiban berlalu lintas khususnya bagi kalangan milenial yang ada di kota Palangka Raya.

Millennial Road Safety Festival 2019 ini dihadiri Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Kapolda Kalteng Irjen Pol. Anang Revandoko beserta seluruh Jajaran Polda Kalteng dan ASN Dinas Instansi Pemda Kalteng, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin beserta jajarannya, Rektor Universitas Palangka Raya Andrea Elia Embang dan Ketua Dewan Adat Dayak Agustiar Sabran.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di hadapan ribuan warga Kota Palangka Raya yang turut serta memeriahkan kampanye keselamatan berlalu lintas tersebut mengatakan kampanye ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. “Kegiatan ini dilaksanakan karena masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Global Status Report on Road Safety 2013 lansiran dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan Indonesia menempati posisi ke-5 terbesar

korban meninggal dunia terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas”, ungkap Sugianto Sabran.

Disebutkan, korban laka lantas secara nasional berdasarkan data Korps Lantas Polri tahun 2018 sebanyak 171.436 orang termasuk 29.083 orang meninggal dunia. Sementara itu untuk Wilayah Kalteng jumlah korban laka lantas tahun 2018 tercatat 1.438 orang termasuk 368 orang meninggal dunia dan dari jumlah tersebut 57 persen diantaranya usia produktif 15 hingga usia 38 tahun yang dikenal sebagai generasi milenial.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peran generasi Milenial sangatlah penting menjadi inspirator dan motivator bagi pengguna jalan raya dalam rangka mendukung keselamatan berlalulintas.

Mengingat pentingnya keselamatan berlalu lintas tersebut, Korlantas Polri bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat seperti koalisi anak muda, organisasi kepemudaan, pelajar dan mahasiswa melakukan kampanye keselamatan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia.

Gubernur mengharapkan “Millennial Road Safety Festival 2019” ini dapat menciptakan

dan menghadirkan generasi milenial yang peduli dan patuh dalam berlalu lintas khususnya di wilayah Kalteng. “Pokok dari kegiatan ini adalah untuk sama-sama mengenal aturan berlalu lintas agar ke depan kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas dapat menurun dan mewujudkan generasi milenial yang cinta lalu lintas menuju Indonesia Gemilang, Stop Kecelakaan dan Keselamatan Untuk Kemanusiaan”, tegas gubernur Kalteng.

Sementara itu Kapolda Kalteng Irjen Pol. Anang Revandoko menyatakan rasa bangganya kepada generasi milenial Kalimantan Tengah. “Ke depan hanya soal waktu yang akan menentukan generasi milenial menjadi penerus kepemimpinan bangsa. Untuk itu generasi penerus dapat mempersiapkan dirinya sejak dini dengan melakukan hal-hal yang positif termasuk dalam perilaku tertib berlalu lintas di jalan raya”, terang Kapolda Kalteng.

Kampanye keselamatan berlalu lintas untuk kalangan generasi milenial itu dimeriahkan dengan berbagai kegiatan antara lain deklarasi keselamatan, jalan santai, senam massal dan hiburan untuk warga masyarakat.***



Gub Kalteng Tegaskan FORSESDASI Agar Tidak Berpolitik

Palangka Raya – Biro PKP. Pengurus Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2021 telah terbentuk dan dikukuhkan di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (15/02).

Posisi dan peranan Sekretaris Daerah sangat strategis. “Posisi dan peranan Sekda sangat strategis dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam tugas dan fungsinya membantu kepala daerah merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi yang memerlukan profesionalisme dan integritas menjadi sangat mutlak”, kata gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika mengukuhkan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Provinsi Kalteng Periode 2019-2021.

Gubernur mengharapkan

kehadiran dan keberadaan FORSESDASI Kalteng ini dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan nasional yang terkait dengan pemerintahan daerah dan menjadi sarana tukar pengalaman serta menjadi tonggak pemersatu NKRI, sarana pemersatu pikiran, langkah dan tekad memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah yang BERKAH : Bermartabat, Elok, Kuat, Amanah dan Harmonis. “Saya ingatkan agar forum ini jangan menjadi organisasi yang ikut berpolitik atau menjadi organisasi yang eksklusif serta tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah, tetapi menjadi organisasi yang memberikan manfaat positif bagi kepentingan daerah, bangsa dan negara”, tegas Sugianto Sabran.

Sehubungan dengan adanya kecenderungan masing-masing perangkat daerah untuk membentuk asosiasi yang lain menurut Sugianto Sabran tidak diperlukan lagi karena sudah terbentuk FORSESDASI Kalteng. “Dengan lahir dan terbentuknya

FORSESDASI Kalteng ini, cukup satu asosiasi atau forum Sekda saja dan seluruh permasalahan dapat ditampung serta difasilitasi dalam forum FORSESDASI Kalteng”, terang gubernur Kalteng tersebut.

Selain itu, gubernur juga minta Sekretaris Daerah agar turut menjaga dan menciptakan suasana kondusif serta mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran Pesta Demokrasi PILPRES dan PILEG April 2019, termasuk ASN juga harus netral sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengurus Korwil FORSESDASI Kalteng 2019-2021 itu diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara sebagai Sekretaris Umum yang dilengkapi dengan 6 Bidang masing-masing Bidang Hukum dan Politik, SDA, Kesra, Hubungan Antar Lembaga, Pemerintahan serta Bidang Perekonomian dan Pembangunan.***

Waketum DPN-IKAPTK Lantik dan Kukuhkan DPP-IKAPTK Kalteng 2018-2023

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKAPTK) Dr.H.Suhajar Diantoro, M.Si melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP-IKAPTN) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023 di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (23/01).

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPP-IKAPTN Provinsi Kalteng Periode 2018-2023 yang dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib. H.Said Ismail itu bertujuan mengokohkan semangat kekeluargaan dan jiwa korsa di antara sesama alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, memelihara ikatan yang kuat antara alumni dengan almamaternya serta melakukan upaya-upaya membantu alumni untuk meningkatkan kemampuannya dalam meniti karier dan mencapai sasaran tertentu dalam rangka pengembangan wilayah pengabdianya.

Ketua DPP-IKAPTK Kalimantan Tengah Drs.Perdie, MA menjelaskan alumni Pendidikan

Tinggi Kepamongprajaan se-Kalimantan Tengah sampai dengan angkatan 28 IPDN mencapai 1.300 orang yang terdiri dari alumni APDN, Alumni STPDN dan Alumni IPDN yang tersebar di seluruh perangkat daerah provinsi dan 14 kabupaten/kota se-Kalteng.

Perdie menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mempercayakan dan memberdayakan alumni pendidikan Pamong Praja untuk duduk dalam jajaran pemerintah provinsi sebagai pejabat struktural dan fungsional tertentu guna membangun Kalimantan Tengah semakin berkah, sejahtera dan bermartabat.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPN-IKAPTK Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si berpesan kepada para Alumni agar memperhatikan 5 hal pokok yakni Pertama meningkatkan dukungan seluruh anggota terhadap upaya peningkatan kualitas almamater pendidikan tinggi Kepamongprajaan dan pembentukan citra positif IKAPTK. Kedua meningkatkan kompetensi diri. Ketiga mengembangkan berbagai kajian dan penelitian mengenai praktek-praktek

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Keempat Berkontribusi positif terhadap upaya memajukan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kelima Tingkatkan peran para anggotanya sebagai pemersatu bangsa dan penegak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan dibacakan Wakil Gubernur Habib H.Said Ismail menjelaskan tantangan aparatur sipil negara di era milenial saat ini sangat dinamis dan terus berkembang yang berbanding lurus dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat saat ini. “Organisasi Kepamongrajaan ini betul-betul diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan provinsi Kalimantan Tengah khususnya dalam mendukung visi misi “Kalteng Berkah”, terang gubernur.

Gubernur menghimbau seluruh alumni yang masih aktif agar dapat memberikan teladan bagi Aparatur Sipil Negara lainnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari pada instansi masing-masing dan dapat berinovasi sesuai perkembangan zaman.***

Gubernur Sugianto Sabran Dukung Zona Integritas Di Kalteng

Palangka Raya – Biro PKP. Peraturan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi menargetkan pencapaian 3 sasaran hasil utama reformasi birokrasi meliputi Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN serta Peningkatan Pelayanan Publik.

“Namun penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien untuk melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional melalui reformasi birokrasi masih menghadapi banyak kendala diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan”, ungkap Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya H.Syahrial Sidik pada acara Penandatanganan Pencanangan Ikrar Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Selasa pagi (15/01).

Untuk itu lanjut Syahrial Sidik, Mahkamah Agung RI mulai membangun Pilot Project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya dalam rangka mengakselerasi pencapaian 3 sasaran hasil utama program reformasi birokrasi tersebut melalui pembangunan Zona Integritas.

Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini, unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM dapat menjadi Pilot Project dan Benchmark untuk unit

kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan bekerja dengan benar sesuai perundang-undangan yang berlaku.”Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas”, terang H.Syahrial Sidik.

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya H.Syahrial Sidik menegaskan Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berkomitmen kuat mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana dan sistem manajemen SDM serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja”, tutur Syahrial Sidik.

Sementara itu gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran ketika menghadiri Pencanangan Zona Integritas tersebut menyatakan sepenuhnya mendukung pencanangan Zona Integritas di lingkup Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam rangka upaya pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

“Kita sadari bersama, persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah masih belum cukup memuaskan. Masyarakat masih menganggap birokrasi pemerintah belum mampu memenuhi keinginan masyarakat banyak untuk memberikan pelayanan prima sehingga masyarakat terkesan enggan berurusan dengan birokrasi yang kinerjanya dianggap lamban, berbelit-belit, rigit dan cenderung biaya tinggi”, beber Sugianto Sabran.

Keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas dari organisasi di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.”Dengan pencanangan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini diharapkan pula penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau dapat dirasakan sehingga hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima semakin meningkat”, jelas Sugianto Sabran.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengharapkan seluruh instansi pemerintah di Kalimantan Tengah dapat mencanangkan Zona Integritas sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi yang bebas dari segala tindak korupsi dan berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.***



Ekspor Kalteng Tahun 2018 Capai Rp 26,6 Triliun

Palangka Raya – Biro PKP. Total nilai ekspor Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 mencapai US\$ 1.903,11 juta atau sekitar Rp 26,6 triliun (dengan kurs Rp 14.000/dolar Amerika), meningkat sekitar US\$ 101,59 juta dibandingkan nilai ekspor 2017 sebesar US\$ 1.800,52 juta. Bahan bakar mineral masih menjadi komoditas utama ekspor Kalteng.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ketika membuka Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) yang bertajuk “Outbound Investment dan Strategi Ekspor Indonesia Ke Kawasan Asia Selatan dan Tengah” di Swissbel Hotel Danum Palangka Raya, Selasa pagi (26/02/2019).

Gubernur Kalteng menyatakan bahan bakar mineral masih menjadi komoditas primadona ekspor di Kalimantan Tengah. India merupakan negara mitra dagang utama destinasi ekspor Kalteng. Secara kumulatif, total nilai ekspor Kalimantan Tengah dari Januari-Desember 2018 sebesar US\$ 1.903,11 juta

“Potensi kewilayahan Kalimantan Tengah ini lebih didominasi pada sumber daya alam. Namun, saat ini sektor kelapa sawit saya pikir menjadi unggulan, dilihat dari distribusi perekonomiannya, karena selain PBS, ada masyarakat sekitar

yang mengelola kebun sawit, baik secara mandiri, plasma, atau koperasi. Berbagai potensi dan capaian sektor perkebunan dan pertambangan itu memiliki andil cukup besar terhadap perkembangan perekonomian dan ekspor Kalimantan Tengah dan Indonesia,” imbuh Fahrizal Fitri.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik kegiatan FKKLN yang diselenggarakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI dan mengharapkan agar kegiatan itu dapat menghasilkan berbagai terobosan dalam rangka peningkatan ekspor, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Tengah khususnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu RI Siswo Pramono menjelaskan Forum Kajian KLN ini akan sangat berkontribusi penting dalam penetapan kebijakan ekspor ke depan. “Rekomendasi dan masukan-masukan yang kita terima hari ini bisa menjadi modal kita untuk menetapkan kebijakan-kebijakan ke depan, termasuk diplomasi khususnya di sektor industri, apakah nanti kelapa sawit, pupuk dan industri-industri lainnya”, tegas Siswo Pramono.

Dijelaskan, kawasan Asia Selatan dan Tengah merupakan

prospek pasar yang bagus bagi ekspor Indonesia. “Jumlah penduduk Asia Selatan dan Tengah saat ini mencapai 2 milyar jiwa, India tentunya yang terbesar. Diperkirakan pada tahun 2050 jumlah penduduk di kawasan itu akan mengalami peningkatan menjadi 2,5 milyar jiwa (26% total penduduk dunia). Perekonomian Asia Selatan dan Tengah juga terus berkembang di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia”, beber Siswo Pramono.

Secara keseluruhan, impor kelapa sawit Indonesia ke kawasan Asia Selatan dan tengah mencapai US\$ 7,7 milyar dari total impor mereka sebesar US\$10,6 milyar, memenuhi lebih dari 69% kebutuhan impor minyak sawit kawasan tersebut.

Forum Kajian KLN ini menghadirkan narasumber, antara lain Mantan Duta Besar RI untuk Meksiko Yusra Khan, Mantan Duta Besar RI untuk Azerbaijan Prayono, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibyo, Kepala Pusat Kajian Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Djatmiko Bris Witjaksono, Senior Vice President Perencanaan Korporat PT Pupuk Indonesia Digna Jatningsih, dan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Sidarta.***

Gub Kalteng : Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sebagai Penggerak Utama Pembangunan

Palangka Raya - Biro PKP. Kick-Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 dipimpin secara kolektif oleh Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran dengan beberapa Bupati melalui video conference di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 17/01).

Gubernur Kalimantan Tengah

Sugianto Sabran menegaskan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. “Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan sektor lainnya sehingga memunculkan pergerakan positif bagi setiap sektor pembangunan,” tegas gubernur.

Sugianto Sabran

menargetkan penyelesaian rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan penyelesaian proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah paling lambat akhir Maret Tahun Anggaran berjalan. “Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah secara elektronik yang terkonsolidasi pada masing-masing lembaga pemerintah sehingga mempercepat penyelesaian petunjuk teknis untuk percepatan pembangunan daerah”, jelas gubernur.

Gubernur mengingatkan Bupati dan Walikota se-Kalteng serta para pemangku kepentingan agar memperhatikan tiga (3) aspek

penting yang dilakukan secara simultan serta didukung komitmen pembiayaan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka percepatan pembangunan daerah. “Ketiga aspek itu adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengembangan kegiatan sektor riil dan sektor ekonomi unggulan yang mengacu pada satuan wilayah pengembangan serta percepatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng melalui pemerataan pembangunan ekonomi”, beber Sugianto Sabran.

Kick-Off Penandatanganan Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD itu diikuti 124 perusahaan dengan total kontrak Rp.587,842

Miliar untuk 183 paket pekerjaan. “Prioritas program dan kegiatan pembangunan 2019 ditujukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan kompetitif. Hal ini diarahkan untuk mampu menarik investasi baru dari sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru serta mengurangi penduduk miskin dan pengangguran”, terang gubernur.

Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan PBJ adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. “PBJ adalah bagian yang memegang porsi dominan dan sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan. Pelaksanaan PBJ

ini terjadi interaksi antara aparatur pemerintah, pengguna serta penyedia barang dan jasa secara sehat dengan sistem tender dan pengguna online untuk seluruh paket PBJ TA 2019,” terang Sekda Kalteng.

Fahrizal Fitri menjelaskan Kick-Off ini bertujuan memastikan seluruh prosedur dan proses administrasi pembangunan daerah dan pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah daerah dapat segera berjalan tepat waktu demi mendorong percepatan pembangunan Kalteng. “Kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan komitmen bersama yaitu terjalannya komitmen Eksekutif dan Legislatif se-Kalteng untuk mempercepat serapan anggaran tahun 2019 melalui penerapan prinsip-prinsip PBJ”, ujar Sekda Kalteng tersebut.***

Januari 2019, Inflasi Kalteng Terendah Se-Kalimantan

Palangka Raya – Biro PKP. Bulan Januari 2019, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi 0,42 persen (mtm). Meski angka tersebut berada di atas capaian inflasi nasional (0,32 persen), namun tercatat lebih rendah dibandingkan 4 (empat) provinsi lain di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur 0,56 persen, Kalimantan Barat 0,66 persen, Kalimantan Selatan 0,81 persen dan Kalimantan Utara sebesar 0,96 persen. Angka itu juga lebih rendah dari rerata historis 3 tahun ke belakang pada periode sama sebesar 0,56 persen.

Data tersebut diungkapkan dalam Press Release Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Asisten Sekda Provinsi, Senin pagi (04/02/2019). Press Release yang dipimpin Staf Ahli Gubernur (SAG) Bidang, Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko tersebut membahas dan evaluasi angka Inflasi Kalteng Periode Januari 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Unit Fungsi Assesment, Ekonomi, dan Surveillance Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah Ridwan Anhar menjelaskan, Kalimantan Tengah bulan Januari

2019 mengalami inflasi sebesar 0,42% (mtm). “Capaian Kalteng ini berada di atas capaian inflasi nasional sebesar 0,32% (mtm), namun terendah untuk regional Kalimantan. Inflasi ini didorong oleh kelompok Volatile Foods, khususnya daging ayam ras”, beber Ridwan Anhar.

Komoditas daging ayam ras kembali menjadi penyumbang tertinggi inflasi Kalteng. Di Palangka Raya tercatat 0,14 persen dan di Sampit sebesar 0,34 persen. Inflasi di Palangka Raya dipicu oleh beberapa komoditas utama seperti sate 0,14 persen, ikan layang 0,07 persen, dan soto sebesar 0,05 persen, sedangkan di Sampit berasal dari komoditas bawang merah 0,10 persen dan beras sebesar 0,05 persen.

Lebih lanjut dijelaskan, besaran inflasi Kalteng tersebut diperoleh dari pantauan dua kota acuan yaitu Palangka Raya dan Sampit. Januari 2019, Palangka Raya mengalami inflasi 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi Januari 2018 sebesar 0,31 persen, sebaliknya Sampit hanya mengalami inflasi 0,34 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Januari 2018 sebesar 0,69 persen.

Meski bulan Januari 2019 Palangka Raya dan Sampit

mengalami inflasi, namun tidak setinggi inflasi akhir tahun 2018. Hal ini disebabkan tingkat harga mulai stabil, pasca lonjakan harga seiring dengan tingginya permintaan selama Hari Raya Natal dan liburan sekolah. TPID Kalteng memperkirakan normalisasi tarif angkutan udara dan permintaan volatile foods tersebut akan mampu menahan laju inflasi di Kalimantan Tengah.

Untuk menekan laju inflasi tersebut, beberapa langkah antisipatif juga sudah dilaksanakan beberapa Dinas terkait, antara lain BULOG memastikan stok persediaan beras cukup memadai, yakni sebanyak 8,677 ton (per 1 Februari 2019). Komoditas lain seperti gula pasir, daging beku, minyak goreng dan tepung juga mencukupi. Stok daging ayam segar beku juga telah ditambah dan tersedia di RPK. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, stok ikan patin di kolam penyangga sudah dipastikan mencukupi. Sementara itu berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalteng tercatat harga daging ayam ras Januari 2019 menyentuh angka di atas Rp 48.000, sudah turun di kisaran Rp 34.000-Rp 36.000 pada 1 Februari 2019, sedangkan harga komoditas bawang juga terpantau stabil.***

Kalteng Siapkan Infrastruktur Untuk Dukong Investasi Masuk Kalteng

Palangka Raya – Biro PKP. Berbagai proyek strategis pemerintah pusat yang dibiayai melalui APBN dan proyek strategis lainnya yang dikelola melalui dana APBD provinsi Kalimantan Tengah seperti jalan dan pelabuhan penyeberangan di beberapa lokasi terus dilaksanakan penyelesaiannya sesuai target.

Untuk memastikan kondisi infrastruktur di wilayah tengah Kalimantan Tengah yang dibangun menggunakan dana APBD provinsi Kalimantan Tengah berjalan sesuai target, harus didukung dengan evaluasi dan monitoring.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta pembangunan infrastruktur jalan, khususnya menuju pelabuhan Bahaur segera diselesaikan. “Pelabuhan penyeberangan Bahaur ini penting bagi Kalimantan Tengah. Karena itu ruas jalan menuju pelabuhan Bahaur harus segera diperbaiki sehingga akses ke pelabuhan berjalan lancar sehingga diharapkan jumlah penumpang meningkat dan dapat memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar”, jelas Sugianto Sabran ketika meninjau kondisi ruas jalan Palangka Raya menuju Bahaur dan pelabuhan penyeberangan Bahaur, Selasa (22/01).

Gubernur mengharapkan pemerintah dan masyarakat 7 Kabupaten/Kota di wilayah tengah dan timur Kalimantan Tengah



agar dapat memaksimalkan penggunaan pelabuhan Bahaur sehingga masyarakat yang ingin menggunakan transportasi laut tidak perlu lagi melalui provinsi tetangga. Sugianto Sabran selain meninjau pelabuhan Bahaur dan akses jalan menuju pelabuhan Bahaur, juga meninjau pembangunan Pabrik Sengon PT.Naga Buana di Pulang Pisau yang diperkirakan rampung dan produksi perdana sengon awal Februari 2019. “Saya mengharapkan Presiden bisa hadir meresmikan pabrik ini dan terminal baru Bandara Tjilik Riwet Palangka Raya”, kata gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Pabrik Sengon milik PT. Naga Buana tersebut untuk sementara

hanya memproduksi Plywood menggunakan bahan kayu keras dengan orientasi ekspor dan tahap pertama melayani pembelian dari perusahaan Sojitzu asal Jepang. Selain ekspor juga untuk memenuhi kebutuhan lokal dan luar pulau, sedangkan tenaga kerjanya mengutamakan penduduk setempat seperti dari desa Buntoi, Mantaren dan Mintin. “Harapan kita pabrik ini akan menampung sekitar 2000 lebih tenaga kerja lokal, belum termasuk tenaga kerja yang berkerja di industri hulu seperti pekerja di areal Hutan Tanaman Industri”, jelas Sugianto Sabran.

Hal ini sangat penting sehingga semua bergerak. Ekonomi berada di tangan masyarakat dan pengusaha sehingga masyarakat mendapatkan hasil dan pengusaha mendapatkan keuntungan. “Hal ini perlu dukungan kita bersama khususnya dari masyarakat Pulang Pisau mengingat investasi sangat penting bagi Kalimantan Tengah. Usaha ini nantinya akan membuka lapangan kerja dan menampung ribuan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Kalau ada perusahaan lain yang mau investasi di Kotawaringin Timur dan DAS Barito, kita dukung”, ujar Sugianto Sabran.***



Pemerintah Terus Berupaya Sediakan Rumah Layak Huni Bagi MBR

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tantangan tersebut antara lain masih rendahnya tingkat keterjangkauan MBR dalam membeli rumah yang disediakan pengembang, meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni termasuk ketersediaan dana dan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan membangun secara swadaya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah juga terlihat masih terbatas kemampuannya.

“Selain itu, akses MBR ke sumber pembiayaan perumahan (Lembaga Keuangan) untuk mendapat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih terbatas, sedangkan pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang”, ungkap Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung pada Rapat Kerja Teknis Pembiayaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di Palangka Raya, Rabu (13/02).

Leonard S. Ampung

menjelaskan berbagai program yang dikucurkan untuk menjawab berbagai tantangan dalam penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa program pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)”, jelas Leonard S. Ampung.

Program sejuta rumah yang sudah memasuki tahun ke-empat sejak dicanangkan menjadi Program Nasional oleh Presiden Joko Widodo, telah menunjukkan peningkatan pencapaian setiap tahunnya. Tiga tahun berturut-turut yakni 2015 tercapai 700 ribu unit, 2016 tercapai 800 ribu unit dan 900 ribu unit pada 2017, sedangkan tahun 2018 terpenuhi target pembangunan 1 juta unit rumah menengah bawah.

Rapat Kerja Teknis Pembiayaan Perumahan Dinas Perkim dan Pertanahan Provinsi Kalteng 2019 itu

bertujuan memberikan informasi, pemahaman dan pengetahuan terkait pembiayaan perumahan khususnya pada program-program baru dari pemerintah pusat serta sosialisasi aplikasi Rumah Indonesia (RUMI) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang penting diketahui oleh ASN yang sebelumnya memanfaatkan Bapertarum.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam sambutan dibacakan Staf Ahli Gubernur Yuel Tenggara mengharapkan Rakernis Pembiayaan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah itu dapat memberikan masukan bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam menyusun program kegiatan penyediaan perumahan khususnya dalam penyelenggaraan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Rakernis ini dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi terwujudnya sinergi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah”, harapan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri.***



Pemprov Kalteng Dukung Peningkatan SDM UPR

PALANGKA RAYA - BIRO PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memberikan dukungan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi melalui Program Bidik Misi KALTENG BERKAH dan sampai saat ini tercatat 5.000 mahasiswa telah menerima bantuan melalui program Bidik Misi Kalteng Berkah tersebut.

Salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945 adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa yang diimplementasikan antara lain melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat. "Tugas kita untuk mencapai tujuan tersebut dengan mencerdaskan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, relevan dan berdaya saing pada lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi", tegas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri pada acara Penandatanganan MoU Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya dengan PT.Bank Kalteng, Dewan Adat Dayak Kalteng, Kejaksaan Tinggi Kalteng dan Kanwil Kemenkum dan HAM Kalteng di Gedung Rektorat Universitas Palangka Raya, Kamis (07/02).

Gubernur Sugianto Sabran mengatakan era masa kini adalah era persaingan global yang menuntut semua pihak lebih intensif dalam mengelola sumber daya terutama Sumber Daya Manusia (SDM) karena manusia merupakan faktor terpenting dalam mencapai keberhasilan kompetitif dan faktor kunci dalam persaingan global. "SDM yang handal dan berkualitas dibutuhkan dalam mengelola teknologi

informasi guna mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat", jelas gubernur.

Dijelaskan, era globalisasi dan revolusi industri generasi ke-empat sangat berpotensi terjadinya perubahan besar-besaran di bidang ketenagakerjaan. "Tidak menutup kemungkinan semua tenaga kerja manusia akan digantikan oleh alat teknologi seperti kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan editing genetik sehingga menjadi tantangan bagi manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak", beber Sugianto Sabran.

Untuk itu ia mengharapkan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri seperti Universitas Palangka Raya harus terus berinovasi agar mampu menjawab tantangan Era Revolusi Industri 4.0 tersebut dengan meningkatkan proses pembelajaran yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta kuat dalam membentuk karakter kearifan lokal dan mencetak lulusan-lulusan yang memiliki daya saing nasional dan internasional.

Di sisi lain, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan baik melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menjabarkan target capaian IPM mencapai 72,50. Selain itu menargetkan rata-rata lama sekolah 10 tahun dan angka harapan usia sekolah 15 tahun pada tahun 2021 merupakan target realistis yang harus diperjuangkan untuk menghadirkan SDM Kalimantan Tengah berkualitas, kompetitif dan mampu bersaing dengan bangsa lain.

MoU tersebut merupakan langkah strategis nyata dalam membina mahasiswa sebagai calon tenaga kerja dan pemimpin bangsa. Karena itu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan sanggup melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tetap menjaga keharmonisan

budaya dan kearifan lokal serta menjadi warga negara Indonesia yang taat hukum dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Sementara itu Rektor Universitas Palangka Raya Dr. Andrie Elia Embang mengutarakan beberapa hal penting dalam MoU tersebut. "Aspek yang sangat besar dari kerja sama ini adalah bagaimana membangun SDM Kalteng berbasis perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip budaya lokal dan nasional yang merupakan budaya bangsa Indonesia", tegas Rektor UPR.

Prinsip mempertahankan kearifan budaya lokal itulah yang menjadi dasar alasan Rektor UPR menggandeng Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng dalam pelaksanaan MoU tersebut. "DAD Kalteng adalah salah satu bagian dari pembangunan SDM Kalimantan Tengah. DAD Kalteng merupakan organisasi resmi yang ada di Indonesia khususnya Kalteng dan berperan memayungi prinsip-prinsip kearifan lokal, pengembangan budaya, menaikan harkat dan martabat masyarakat Dayak maupun Non Dayak yang ada di Huma Betang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah", ungkap Rektor UPR Andrie Elia Embang.

UPR harus mampu menjawab tantangan global dengan meningkatkan integritas akademik, kualitas kelulusan mahasiswa dan kualitas SDM Dosen di UPR. "Hal ini perlu dukungan semua pihak tanpa adanya sekat dan mendapat payung hukum yang jelas dalam melakukan pengembangan-pengembangannya", tegas Rektor UPR tersebut.

Dijelaskan, UPR selain mengeluarkan ijazah bagi mahasiswa yang lulus, juga memberikan sertifikat pendamping kompetensi mahasiswa yang terkoneksi dalam hal pencarian tenaga kerja dan program tersebut dilaksanakan dalam wisuda mendatang.***

Pemrov Kalteng Siap Laksanakan UNBK 2019

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi siswa-siswi SMA/SMK tahun 2019. Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan UNBK tersebut, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi UNBK, Validasi Soal USBNBK SMA/SMK, ToT OSN Komputer SMA/SMK dan LKS-SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di Palangka Raya, Selasa (19/02).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Slamet Winaryo menjelaskan Dinas Pendidikan Kalteng terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana pendukung termasuk kesiapan SDM pendukung UNBK sejak kewenangan SMA dialihkan kepada pemerintah provinsi. “Hitungannya secara matematik, memang kita perlu menyediakan 10.000 unit komputer untuk mencukupi kebutuhan UNBK dan dalam 2 tahun terakhir Disdik Kalteng terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukung UNBK tersebut, tapi masih kurang”, terang Slamet Winarno.

Dijelaskan, jumlah peserta UNBK Tahun 2019 tingkat provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 32.642 siswa SMA/SMK dan Madrasah Aliyah. Sejak tahun 2017 provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer 100% dan tahun 2019 Ujian Sekolah Berstandar Nasional dengan berbasis komputer dan android.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA, SMK dan SLB terus meningkat dengan banyaknya lulusan AMP/MTs yang dapat ditampung dijenjang SMA dan SMK.

Demikian juga dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) pemerintah provinsi Kalimantan

Tengah mampu membangun sarana pendidikan secara signifikan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan meliputi Ruang Kelas Baru SMA 108 Unit, RKB SMK 40 Unit, Ruang LAB IPA SMA 65 Unit, Lab Komputer SMA 21 Unit, Lab Perpustakaan SMA 17 Unit, Rehabilitasi Ruang kelas 31 Unit, pembangunan Ruang Praktik SMK 82 Unit, pembangunan 5 Unit sekolah baru dan 1 unit SLB, pengadaan 2.500 Unit komputer untuk mendukung UNBK serta peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan harus dilandasi dengan pemikiran bahwa pendidikan merupakan pondasi dasar untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas pada era global harus lebih intensif sehingga mampu bersaing dalam kondisi zaman yang terus berubah. “Manusia merupakan faktor terpenting dalam mencapai keberhasilan kompetitif dan juga salah satu faktor kunci dalam persaingan global, khususnya dalam mengelola teknologi informasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang mensejahterakan kehidupan masyarakat”, jelas gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan yang disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri di hadapan peserta sosialisasi UNBK tingkat provinsi Kalteng 2019.

Dikemukakan, era globalisasi dan revolusi industri generasi ke-empat sangat berpotensi terjadinya perubahan besar-besaran di sektor ketenagakerjaan yang ditandai dengan beralihnya penggunaan tenaga kerja manusia digantikan oleh alat teknologi yang serba canggih. “Perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Namun penyelenggaraan pendidikan harus mampu menghadirkan pemerataan

pendidikan yang bermutu dan adil dengan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual, keterampilan dan akhlak mulia yang seimbang”, tegas gubernur.

Gubernur meminta penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Tengah difokuskan pada 5 program prioritas untuk mencapai target peningkatan indeks pembangunan manusia yang lebih baik. Ke-5 program prioritas tersebut meliputi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan pelayanan pendidikan di daerah pedalaman dan terpencil, meningkatkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan dukungan beasiswa untuk lulusan SMA/MA/SMK di Perguruan Tinggi.

“Kita patut bersyukur dengan kerja keras disertai strategi yang tepat sehingga kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pembangunan pendidikan sehingga target pembangunan pendidikan pada RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus meningkat secara signifikan”, ungkap Sugianto Sabran.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri se usai membuka sosialisasi UNBK tersebut menjelaskan kepada awak media bahwa persiapan UNBK itu sudah dilakukan. “Tinggal memantapkan saja dan kalau memang ada kekurangan yang perlu dijaga saat pelaksanaan UNBK adalah masalah jaringan listrik”, beber Fahrizal Fitri.

Bagi SMA dan SMK swasta yang kekurangan fasilitas, boleh bergabung dengan sekolah-sekolah negeri. “Kami terus berusaha untuk meningkatkan infrastruktur dan peralatan pendukung UNBK tersebut”, tutur Sekda Kalteng tersebut. ***

Kapolda Kalteng Ingatkan Generasi Muda Jangan Melupakan Sejarah.

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Upacara Bendera Kesadaran Nasional “Hasupa Hasundau” yang diikuti perwakilan pelajar dan mahasiswa, TNI/Polri usia muda yang masuk golongan milenial dan ribuan ASN/Tekon lingkup Pemda Kalteng di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dengan Inspektur Upacara Kapolda Kalteng Irjen Pol. Anang Revandoko, Kamis pagi (17/01).

Apel Kesadaran Nasional tersebut untuk memupuk kesadaran khususnya di kalangan generasi muda harapan bangsa. “Kegiatan ini merupakan bentuk kesadaran kita semua mengingat pemuda adalah harapan bangsa dan memegang peranan yang sangat penting dalam eksistensi

sebuah negara”, tegas Kapolda Kalteng Irjen Pol Anang Revandoko.

Anang Revandoko mengatakan dewasa ini Generasi Milenial menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat di kalangan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pendidikan, teknologi, moral dan budaya mengingat generasi milineal memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan dibandingkan generasi sebelumnya. “Pemuda sebagai sosok yang dinamis serta penuh energi dan optimis diharapkan menjadi agen perubahan yang bergerak membawa ide-ide segar dan pemikiran yang kreatif dengan metode yang inovatif”, tutur Kapolda.

Dikemukakan, bangsa

Indonesia dapat berdiri tegak sampai saat ini berkat keringat dan air mata para pahlawan pejuang kemerdekaan. Bangsa Indonesia terbentuk dari keberagaman suku dan budaya dengan Pancasila satu-satunya perekat kebhinekaan. “.”Karena itu generasi muda jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jaga dan rawat Pancasila agar bangsa ini dapat tetap berdiri, bersatu, berdaulat dan dapat bersaing dengan negara-negara lain pada masa mendatang”, tegas Kapolda.

Diingatkan, kesempatan hanya datang sekali. Waktu terus berjalan dan tidak akan terulang kembali. “Isi waktu mudamu dengan kegiatan yang positif dan produktif serta belajar dan belajarlah karena masa depan bangsa Indonesia ada di pundak kalian”, ujar Kapolda Kalteng Irjen Pol Anang Revandoko.***

Ketua TP PKK Kalteng Yulistra Ivo : TP PKK Bekerja Dengan Semangat Relawan

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gerakan PKK memasuki usia 47 tahun selalu mengevaluasi diri dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini terutama yang berkaitan dengan manajemen program dan kelembagaan.

Terdapat satu hal mendasar yang tercantum dalam Dokumen Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK tahun 2015 yang mengamanatkan Tim Penggerak PKK perlu menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan Rencana Kerja Tim Penggerak PKK kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga Rencana Kerja TP PKK menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah bisa memberikan dukungan serta fasilitas terhadap program PKK.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Ashari Sugianto Sabran mengatakan berdasarkan Permendagri Nomor : 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK tahun 2015 tentang Kelembagaan yang mengatur pengangkatan

Ketua TP PKK di setiap jenjang dijabat secara fungsional oleh istri Kepala Daerah. Namun dalam hal-hal tertentu apabila Ketua Fungsional berhalangan, maka pembina dapat menunjuk istri Wakil Walikota atau istri pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota sebagai Ketua TP PKK setempat.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokratisasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Salah satu lembaga kemasyarakatan yang telah ada dan diakui manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan PKK yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

keluarga”, terang Yulistra Ivo Sugianto Sabran ketika melantik Emnestiningsih sebagai Ketua TP PKK Kota Palangka Raya, Rabu (20/02).

Diingatkan, para Pimpinan dan Anggota Tim Penggerak PKK maupun Kader PKK adalah relawan yang bekerja tanpa pamrih. “Dalam kaitan ini kami ingin menggaris bawahi, bahwa sebagai gerakan masyarakat, PKK tidak berpolitik praktis. Meskipun demikian, segenap jajaran Tim Penggerak PKK sepatutnya memahami perkembangan politik dalam negeri, tanpa harus terlibat langsung dalam politik praktis”, tegas Yulistra Ivo Sugianto Sabran.

Yulistra Ivo Sugianto Sabran meminta kepada seluruh Pengurus TP PKK, Kader PKK dan Kader Dasawisma agar memahami makna hakiki tentang peran dan posisi Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah. “TP PKK diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada, melakukan penyesuaian sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pola penganggaran, senantiasa bekerja dengan semangat relawan tanpa pamrih dan jangan pernah lelah untuk menimba ilmu”, terang Ketua TP PKK Kalteng tersebut.***

Tim Penggerak PKK Kalteng Galakkan Kampanye AMIR

PALANGKA RAYA-BIRO PKP. Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah mulai gencar mengkampanyekan gerakan Ayo Minum Air (AMIR) dan Ramah Lingkungan (Go Green) di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang ada di Palangka Raya.

Kampanye gerakan Ayo Minum Air 6 gelas sehari bagi anak-anak PAUD dan TK itu disambut antusias oleh pengelola dan anak-anak PAUD serta anak-anak TK dan para guru TK di Palangka Raya. Hal itu terbukti dengan antusiasnya para guru TK dan pengelola PAUD beserta anak didiknya mengikuti kampanye gerakan Ayo Minum Air yang dimeriahkan dengan Senam AMIR serta pemberian makanan bergizi kepada 260 anak PAUD dan anak TK dari 10 PAUD dan 7 TK di lokasi TK Negeri Pahandut Palangka Raya, Rabu (23/01).

Kampanye gerakan Ayo Minum Air 6 gelas sehari bagi anak PAUD dan TK itu dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran. “Melalui Kampanye Ayo Minum Air (AMIR) ini diharapkan orang tua bisa membiasakan anak – anaknya minum air putih minimal 6 gelas sehari dan dapat membekali anak –anaknya dari rumah masing –masing menggunakan termos air putih sebagai bentuk kampanye Ramah Lingkungan dalam rangka mengurangi limbah plastik mengingat limbah plastik perlu waktu bertahun – tahun untuk bisa diuraikan kembali”, tegas Ivo Sugianto Sabran.

Ketua Tim Pengerak PKK Ivo Sugianto Sabran dan Pengurus PKK provinsi Kalteng dalam suasana kegembiraan dan keakraban bersama ratusan anak – anak PAUD dan TK beserta pengasuh PAUD dan para guru TK mengikuti Senam Sehat AMIR. Senam Sehat AMIR ini akan dilombakan di tingkat nasional. “Senam Sehat Amir ini memang lomba berskala nasional. Namun apabila tidak sampai ke tingkat



nasional, akan ada penilaian dari PKK Provinsi Kalimantan Tengah untuk memilih 3 besar dan mendapatkan reward dari PKK Provinsi Kalimantan Tengah. Jangan khawatir, tunjukkan yang terbaik walaupun tidak menjadi pemenang dan saya harap pesan dari kampanye minum air putih ini dapat terus digalakkan”, terang Ivo Sugianto Sabran.

Kampanye AMIR selanjutnya dilakukan secara kontinyu dan dijadwalkan pada 10 PAUD dan 10 Posyandu yang dilakukan secara terintegrasi. Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran mengatakan apabila kampanye AMIR ini mendapat respon positif

dari masyarakat dan berjalan sukses, maka kampanye AMIR ini akan diperluas cakupannya hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota se- Kalimantan Tengah.

Sementara itu salah seorang Pengurus PKK provinsi Kalteng Dokter Fitrianto menjelaskan Kampanye AMIR tersebut merupakan bentuk Kampanye Duta Ginjal Sehat. “Kampanye AMIR juga merupakan bentuk dari kampanye Duta Ginjal Sehat yang mengkampanyekan kepada anak – anak agar minum air putih minimal 6 gelas dalam sehari dan dapat membiasakannya sampai dewasa sehingga ginjal tetap sehat serta menghindari terjadinya obesitas”, ungkap Dokter Fitrianto.***





RAMAH TAMAH

ACARA RAMAH TAMAH
RAPAT TAHUNAN (RATA) XXXIX
DIREKTOR BINA PTN - BANGKALAYATI
PALANGKAH, 10 JANUARI 2019

